

Dampak Negatif Jembatan Merah Putih terhadap Komunitas *Subaltern* Pendayung Perahu di Teluk Ambon

(The Negative Impact of the Red and White Bridge on the Subaltern Community of Boat Rowers in Ambon Bay)

Nur Aida Kubangun

Revaldo Pravasta Julian M. B. Salakory

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

Jalan Ir. Putuhena, Poka, Ambon

Tel.: +62(911)3825203

Surel: nuraidakubangun@gmail.com

Diterima: 21 Agustus 2021

Direvisi: 10 Desember 2021

Disetujui: 22 Desember 2021

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kelompok subaltern pendayung perahu di desa Poka. Penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan sebuah strategi bagi subaltern pendayung perahu Poka-Galala agar dapat memperoleh strategi yang tepat agar dapat keluar dari himpitan kemiskinan yang diakibatkan adanya pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP) sehingga berkurangnya pendapatan subaltern bahkan hilang mata pencaharian yang selama ini merupakan sumber penghasilan dalam menghidupi keluarga mereka. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat dilihat oleh stakeholder pada propinsi Maluku maupun pemerintah Kota Ambon agar mendapat solusi yang tepat dalam mengembalikan sistem mata pencaharian hidup yang ada pada kalangan subaltern pendayung perahu Poka-Galala yang selama ini menggantungkan hidup pada pekerjaan ini. Untuk itu penelitian diharapkan dapat menghasilkan sebuah strategi yang tepat bagi para subaltern, namun apakah subaltern ini mampu jika tidak dibantu baik secara finansial maupun secara moril berupa motivasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta bagaimana menyuarakan hak mereka pada pemerintah sebab pada dasarnya subaltern adalah kelompok masyarakat yang termarginalkan yang tidak mampu mengungkapkan apa yang mereka inginkan mereka membutuhkan suara-suara yang tegas yang duduk di pemerintahan, dan bagaimana dengan perhatian pemerintah itu sendiri, kebijakan yang mereka butuhkan adalah kebijakan yang benar-benar berpihak pada subaltern, jika diperbolehkan maka pemerintah seyogyanya dapat merekayasa kembali teluk Ambon yang indah ini sebagai tempat wisata berbasis perairan laut sehingga dapat mengembalikan kembali pendapatan subaltern yang berkurang bahkan hilang sama sekali akibat adanya pembangunan Jembatan Merah Putih.

Kata kunci: dampak negatif, Jembatan Merah Putih, pendayung perahu, *subaltern*, Teluk Ambon

Abstract

This research is expected to produce a strategy for the subaltern Poka-Galala boat rower to get out of poverty caused by the construction of the Jembatan Merah Putih (Red and White



Bridge). The bridge has caused them to lose their livelihood. In addition, the research is also expected to be seen by stakeholders in the Maluku province and the Ambon City to come up with a solution to restore the livelihood of this subordinated class of Poka-Galala boat rowers. This subaltern community is a marginalized group which is unable to express what they want because there is no voice representing theirs in the government. The study argues that this community needs the attention of the government in form of policies that favor them. Such policies may include the reengineering of Ambon Bay into a tourist attraction which in turn will restore the rowers' livelihood.

Keywords: Ambon Bay, boat rower, Jembatan Merah Putih, negative impact, subaltern

PENDAHULUAN

Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat *top-down*, tetapi tergantung dengan "*innerwill*", proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin terjadi karena proses pendewasaan. Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antarpelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro 2004). Dalam konteks inilah diperlukan "strategi berperang" modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D'Aveni 1999), Pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

Di Maluku pascakonflik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mulai membangun kembali Maluku, baik dari sisi fisik maupun sisi psikologi masyarakat Maluku yang mengalami konflik SARA yang berlangsung selama lebih kurang 5 tahun. Dari sisi ekonomi pun diperbaiki dan dalam waktu singkat Kota Ambon kembali menjadi pusat penanaman investasi mulai dari mal-mal seperti Maluku City Mal, Ambon City Center, supermarket seperti Indomaret dan Alfamidi yang berkembang bak jamur diseluruh sudut Kota Ambon maupun di seluruh pinggiran Kota Ambon sepanjang mata memandang terpampang super market yang kemungkinan besar sudah menyingkirkan penjual- penjual kelontongan yang berada di depan rumah mereka, di tepi-tepi jalan sepanjang Kota Ambon maupun lahan-lahan yang mereka gunakan untuk menyambung hidup mereka dengan berjualan.

Hal ini diperparah dengan gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat Kota Ambon, khususnya yang menjurus ke gaya hidup hedonisme (konsumtif) yang semakin pesat berkembang di kalangan masyarakat, sementara di satu sisi pendapatan masyarakat yang awalnya baik mulai berkurang karena adanya pembangunan yang mulai berkembang dengan pesat. Yang terjadi pada masyarakat jika pengeluaran semakin tinggi, tetapi pendapatan berkurang, bahkan kehilangan mata pencaharian, di mana-mana timbul masalah sosial yang mengakibatkan kemiskinan, ketakutan karena muncul tindakan kriminal dari masyarakat yang satu kepada masyarakat yang lain yang bahkan menjurus ke tindakan pembunuhan, baik itu pembunuhan yang bersifat moril yaitu pembunuhan karakter dan pembunuhan yang bersifat fisik yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain hanya untuk memenuhi keinginan individu atau kelompok.

Di satu sisi pembangunan pada suatu bangsa sangat baik, tetapi di sisi lain masyarakat belum siap dengan adanya perkembangan pembangunan yang begitu pesat mengakibatkan sekelompok masyarakat termarginalkan hanya karena pembangunan tersebut menghilangkan sistem mata pencaharian yang sudah mereka jalani selama beberapa dasarwasa. Pembangunan Jembatan Merah Putih yang panjangnya kurang lebih dua kilo meter yang merupakan kebanggaan masyarakat Kota Ambon ternyata mengakibatkan sekelompok masyarakat kehilangan mata pencaharian, antara lain para pendayung perahu yang dalam kehidupan keseharian mereka membantu masyarakat yang ingin menyeberang dari Poka ke Galala atau sebaliknya di sekitar teluk Ambon.

Kelompok pendayung perahu ini merupakan kelompok kecil atau yang menggunakan jasa transportasi laut dalam pelayanan pribadi (*personal service*) perahu sebagai pekerjaan, sebelum adanya pembangunan transportasi darat Jembatan Merah Putih, cukup membantu memenuhi kebutuhan primer keluarga mereka. Namun, berbeda ketika Jembatan Merah Putih telah menjadi pilihan rasional masyarakat. Padahal, sebelum hadirnya Jembatan Merah Putih yang menghubungkan Poka-Galala pilihan jasa pelayanan perahu sering digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen yang tinggal di Kecamatan Sirimau, Nusaniwe, dan Baguala. Pilihan pelayanan jasa perahu ini karena dinilai lebih cepat dalam efektivitas waktu dari pada transportasi laut yang lain seperti kapal ferry dan transportasi darat angkutan umum.

Peneliti melihat dampak pembangunan yang tidak merata secara sosial ekonomi ini perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah kota karena dari pembangunan tersebut timbul ketimpangan sosial terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan di ranah publik. Peneliti melihat ketidakpedulian regulasi pemerintah dalam memerhatikan kelompok pendayung perahu ini, padahal para pendayung perahu ini terlibat dalam mem-branding pariwisata laut di Maluku misalnya ketika acara festival, serta memeriahkan acara pencahangan gerakan masyarakat sehat (Germas).

Istilah *subaltern* mula-mula digunakan dan diperkenalkan oleh seorang Marxis Italia Antonio Gramsci sebagai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa melalui risetnya mengenai kaum petani desa Italia dan sejarah pemberontakan *subaltern* di Asia Selatan pada masa kolonial dan poskolonial. Gramsci menggunakan istilah *subaltern* secara bergantian dengan *subordinat* dan *instrumental* untuk mendeskripsikan 'kelompok atau kelas yang nonhegemonik.' Awalnya, cukup sulit memahami perbedaan sistematis antara cara Gramsci menggunakan kata *subaltern* dan *subordinat*. Beberapa beranggapan bahwa Gramsci menggunakan istilah itu sebagai kode-kata untuk menghadirkan istilah yang lebih populer dari istilah Marxis Proletar. Namun, seiring perkembangannya pilihan kata *subaltern* kelihatannya memang lebih tepat untuk mengartikan subordinat seperti kaum petani desa di Italia selatan, yang pencapaian kesadarannya dan politiknya terbatas dan kesatuan politik yang lemah (Reed 2013).

Subaltern sangat berbeda dengan proletar industrial karena *subaltern* belum memiliki kesadaran kolektif mengenai penindasan secara ekonomi dan politik sebagai sebuah kelas. Fase awal gerakan nasionalis India merupakan contoh pendekatan kajian *subaltern* yang secara terus-menerus menentang elitisme historiografi nasionalis borjuis yang berakar dari ideologi kolonial Inggris. Hal yang diabaikan oleh historiografi elit, menurut Ranajit Guha, adalah "politik rakyat" atau ranah politik India saat itu di mana aktor-aktor pentingnya membentuk *subaltern* dari populasi kerja di kota dan di desa yaitu rakyat, tetapi bukan berarti kajian *subaltern* secara otomatis disamakan dengan rakyat. Menanggapi hal itu, Spivak dalam "scattered speculations

on the subaltern and the popular” menegaskan *subaltern* adalah nama dari ruang perbedaan. Walaupun di awal Guha mengatakan bahwa kata *rakyat* dan *subaltern* bisa saling menggantikan, tetapi itu bukan poin yang substantif bagi Spivak, karena menurut Spivak secara krusial “*subalternitas* merupakan posisi tanpa identitas.”

Seiring dengan perkembangannya, kajian-kajian *subaltern* berkembang yang pada prinsipnya peduli pada riset tentang praktik-praktik sosial dan politik kelompok-kelompok yang tidak mampu merepresentasikan diri mereka sendiri sebagai kelas atau kelompok sosial dalam historiografi elit (negara) dan hal yang penting lainnya perlu ditekankan bahwa kajian *subaltern* tidak dapat dilepaskan dengan berbagai gagasan dan konsep yang membentuknya yaitu poskolonial dan politik identitas (Ruslin 2017). Ranajit Guha, seorang sejarawan India untuk menuliskan kembali sejarah India. Guha memberikan penjelasan yang lebih menarik daripada Gramsci mengenai *subaltern* karena ia memberikan sesuatu yang baru dan kerangka yang jelas untuk menjelaskan “siapa kawan, siapa lawan.” Pandangan baru Guha adalah terletak pada penjelasannya mengenai dikotomi penindasan yang tidak hanya dilakukan “kelompok luar,” tetapi juga dilakukan “kelompok dalam.” Penindasan tidak hanya terjadi pada “kolonial-antikolonial,” “buruh-majikan,” “sipil-militer,” tetapi juga terjadi pada “elit-*subaltern*.” Spivak menggunakan istilah *subaltern* dalam tulisannya yang berjudul “Can the Subaltern Speak?” Ia telah memperdalam dan memperjelas gagasan Guha. Petani, buruh, perempuan, kelas miskin, dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan “hegemonik” sebagai kelas *subaltern*. Konsep *subaltern* berasal dari sebuah artikel yang mengangkat kisah tragis adik neneknya (Bhuvanewari Bhaduri) yang menggantung diri di Calcutta Utara pada tahun 1926 ketika berusia sekitar 16-17 tahun. Gantung diri ini di latar belakang oleh ketidakmampuannya menjalankan tugas pembunuhan politik yang dipercayakan kepadanya. Bagi Spivak inilah bukti sebuah ketidakmampuan berbicara, dan malah memilih bunuh diri (Spivak 2020).

Eric Hobsbawm dan E. P. Thompson menggunakan istilah *subaltern* sebagai nama bagi atribut umum subordinasi dalam masyarakat Asia Selatan, baik terekspresikan dalam istilah kelas, kasta, umur, jender, dan kantor atau dengan cara lain lagi. Secara krusial sejarawan kajian *subaltern* berupaya menekankan bahwa konsep mengenai *subaltern* menandai perbedaan sosial demografi antara kaum elite dan yang lainnya di Asia Selatan (Morton 2010). Menurut Guha, membangun suatu definisi dari orang-orang setempat hanya terjadi sebuah identitas-identitas deferensial, ia mengusulkan jaringan stratifikasi yang dinamis yang menggambarkan produksi sosial kolonial secara luas. Kelompok-kelompok ini seperti yang digambarkan Derrida sebagai berikut: (a) kelompok asing yang dominan, (b) kelompok pribumi yang dominan di tingkat seluruh India. Kelompok masyarakat adat yang dominan di tingkat regional dan lokal, orang-orang dan kelas *subaltern*. Istilah orang dan kelas *subaltern* telah digunakan di seluruh tulisan ini. Kelompok-kelompok sosial dan unsur-unsur yang termasuk dalam kategori ini mewakili perbedaan demografi antara penduduk India secara keseluruhan dan semua orang yang kita gambarkan sebagai “elit.” Kelas yang sama atau dominan di suatu daerah bisa jadi yang lain didominasi. Ini memang menciptakan banyak ambiguitas dan kontradiksi dalam sikap dan aliansi, terutama di antara strata terendah dari tuan tanah pedesaan, tuan tanah yang miskin, petani kaya, dan petani menengah ke atas yang semuanya adalah milik, idealnya pada kategori “orang” atau “kelas *subaltern*”. Menurutnya, bentuk tenaga kerja *subalterenian* primitif atau prakapitalis tidak ada artinya sama sekali dalam arti periode waktu yang sebelumnya sekedar kronologis pada skala waktu yang homogeni dan berurutan (Spivak 2020).

Uday Chandra (2015) dalam tulisannya meninjau kembali artikel-artikel resistensi antara *subaltern* dan Negara India kontemporer, dan memberikan penghormatan kepada teori-teori lama resistensi *subaltern* di India dan di luar India, tetapi juga merespons dengan jelas dan kuat terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh berbagai kritik resistensi. Perlawanan sebagai negosiasi, bukan negasi (Maji 2015). Artikel ini secara luas membahas bidang-bidang yang muncul dari banyak kiasan subalternitas, marjinalisasi, dan pembangkangan di India hari ini, dengan fokus khusus pada area Junglemahal di Benggala Barat yang terdiri atas daerah-daerah yang terpengaruh Maois seperti Purulia, Bankura, dan Medinipur. Penelitian ini berupaya memfokuskan pada kegagalan negara pascakolonial melalui penyelidikan terhadap paradigma pemerintahan cacat yang represif dan brutalisasi. Ini berfokus pada ekonomi pasar dan narasi terkait pembangunan dan dengan melakukan itu, ia meneliti dikotomi antara apa yang disebut India yang baru dan aspirasional dan India yang terpinggirkan, atau apa yang digambarkan oleh Utsa Patnaik beberapa tahun yang lalu sebagai “republik kelaparan.” Oleh karena itu, artikel ini menyelidiki ke dalam zona kekurangan perampasan, kemiskinan dan suara-suara pemberontak yang dihasilkan yang melatarbelakangi teriakan marjinalisasi dan problematik *template* hegemonik developmentalisme di India hari ini, sebuah narasi yang semakin diperkuat dengan pembentukan politik sayap kanan.

Penelitian terdahulu dalam skala nasional peneliti dari Indonesia terkait *subaltern*, misal, Ruslin (2017), “Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar.” Di Maluku sendiri, Kubangun (2020) dalam tulisannya terkait dengan *subaltern* nelayan yang hak mereka dirampas dan dikuasai oleh para penguasa elit. Ia berargumen bahwa stratifikasi sosial melanggengkan praktik kekuasaan elitis. Hal itu disebabkan para nelayan tidak memiliki koneksi dengan para elitis. Eksploitasi di sini juga dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu (1) eksploitasi yang dilakukan oleh elit adat terhadap *subaltern*; (2) eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pemilik motor/juragan, yaitu dengan memberi pinjaman berupa biaya operasional dan sewa ulayat, tetapi dengan menggunakan bunga 10 persen, begitu pun dalam pinjaman dalam bentuk barang akan dinaikan harganya dengan selisih harga normal. Ketika pinjaman tidak dapat dibayarkan kepada pemilik motor/juragan, konsekuensinya tidak diberi pinjaman lagi sebelum hutang dilunasi; (3) eksploitasi pemilik motor/juragan terhadap *subaltern* ini terletak pada pembagian hasil bela bambu yang dirasakan tidak adil oleh *subaltern*, sementara dari falsafah bela bambu sebenarnya adalah pembagian rata atau dibagi dua, tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian adanya; (4) *subaltern* yang merupakan hasil dari tindakan *stakeholder* terhadap *subaltern* yang ada di Kepulauan Aru dengan memberi bantuan yang tidak merata, tidak menyentuh sampai pada *subaltern* yang benar-benar membutuhkan, bahkan tidak adil dalam memberi kebijakan-kebijakan yang hanya akan menyengsarakan *subaltern* itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini melihat dampak negatif Jembatan Merah Putih bagi para pendayung perahu dan strategi aktif kelompok *subaltern* pendayung perahu di Poka, serta strategi pengembangan yang membutuhkan sinergitas antara masyarakat dan *stakeholder*. Peneliti melihat bahwa perlu adanya regulasi pemerintah untuk memerhatikan kelompok ini, sebab dampak sosial yang mereka rasakan dengan adanya Jembatan Merah Putih, maka penumpang telah berkurang. Sementara itu, di sisi lain, kelompok pendayung perahu harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Dengan demikian, apakah mereka beralih mata pencaharian atautkah mereka harus berhenti sampai di sini dan tidak memiliki mata pencaharian, apakah suara minor mereka didengarkan oleh pemerintah Kota Ambon. Masalah-masalah inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk menelusuri lebih jauh lagi tentang kondisi masyarakat sebagai pendayung perahu penyeberangan Poka-Galala. Lebih lanjut, artikel ini

menawarkan solusi masalah para *subaltern* yang dapat bertransformasi menjadi agen wisata perahu di Teluk Ambon.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan yaitu penelitian deskriptif, untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti (Slamet 2006). Objek penelitian adalah komunitas *subaltern* pendayung perahu di Teluk Ambon, sedangkan subjek penelitian yakni perwakilan komunitas *subaltern* pendayung perahu, perwakilan pihak Desa Poka, dan pengguna jalan JMP. Penelitian ini berlokasi di Desa Poka, dari bulan Juni- Oktober 2021. Teknik pengumpulan data melalui observasi secara langsung, dokumentasi, dan wawancara dengan subjek penelitian. Selain data lapangan, peneliti mencari data sekunder melalui buku dan jurnal ilmiah. Guna mencapai analisis yang efektif, peneliti menggunakan SWOT untuk melihat ketercapaian masa depan bagi komunitas *subaltern* pendayung perahu (Rangkuti 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

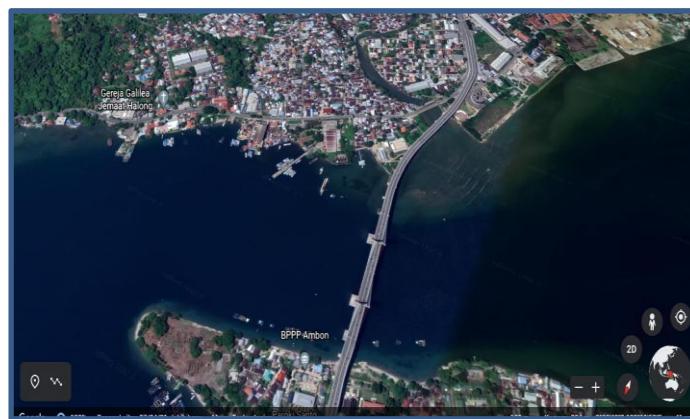
Dampak Kemiskinan Pembangunan Jembatan Merah Putih Bagi Subaltern Pendayung Perahu

Peneliti melihat bahwa secara kultural, perahu yang digunakan oleh kelompok pendayung perahu ialah transformasi dari alat transportasi *arumbae*, *kole-kole*, dan lain-lain. Meskipun secara fungsional di zaman ini mengalami perbedaan fungsi, memiliki nilai sosial-budaya yang tinggi. Selain itu, bagi masyarakat pendayung perahu, laut menjadi tempat mereka mencari nafkah, alat transportasi perahu membantu mereka mengarungi laut untuk memastikan kehidupan mereka setiap hari, kebutuhan yang harus dipenuhi menuntut mereka untuk tetap berjuang tanpa takut kepada cuaca yang berubah tiap musim. Ketidakpedulian pemerintah memastikan kehidupan kelompok *subaltern* ini mengartikan kurangnya penghormatan terhadap memori kultur sebagaimana diketahui terjadinya pelayaran antara Poka dan Hitulama berawal dari sebuah transportasi laut, yaitu perahu.

Pemerintah kota sejauh ini dilihat terampil dalam membangun infrastruktur di Kota Ambon. Perspektif pembangunan infrastruktur di Kota Ambon menunjukkan bahwa Kota Ambon sedang berada dalam sebuah perubahan zaman modernisasi. Mirip kota besar yang Kota Ambon tidak ingin tertinggal dalam bidang pembangunan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan bidang wisata. Secara teoretis, menurut Siagian (2014), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar, artinya pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memerhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu atau negara (*state*) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayan publik (sebagai akibat mekanisme pasar tidak bekerja) untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat.

Infrastruktur yang disiapkan pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan Jembatan Merah Putih membuka akses transportasi darat dan meningkatkan efisiensi waktu sebab jembatan ini menghubungkan Poka dan Galala. Wilayah Poka yang diketahui bersama sebagai tempat pendidikan tinggi Universitas Pattimura, dan juga untuk menuju lokasi bandara, sehingga pemerintah mengambil kebijakan pembangunan jembatan ini dinilai langkah yang tepat untuk memangkas waktu jangkauan menuju lokasi tersebut. Dalam artikel Mandaku dan Ratlalan yang melihat bahwa efisien menggunakan Jembatan Merah Putih hanya membutuhkan waktu 1,59 menit, berbeda ketika masyarakat menggunakan kapal fery yang membutuhkan waktu 19 menit. Pascaperesmian oleh Presiden Jokowi, jembatan ini sejauh ini menjadi ikon yang mem-branding Kota Ambon. Jembatan ini menjadi tempat wisata baru bagi masyarakat lokal ataupun para pendatang untuk menikmati keindahan teluk Ambon dari ketinggian.



Gambar 1. Lokasi Jembatan Merah Putih di Teluk Ambon
(Sumber: Google Earth)

Jembatan Merah Putih dapat dilihat memiliki nilai positif bagi Kota Ambon karena menjadi menarik para wisatawan yang datang ke Ambon. Namun demikian, jembatan ini juga berdampak pada para pendayung perahu (*personal service*). Kelompok pendayung perahu ini termarjinalkan. Berdasarkan temuan peneliti, pekerjaan pendayung perahu ini telah dilakukan secara turun-temurun. Secara teoretis, kelompok ini termasuk *subaltern*. *Subaltern* sendiri tergolong dalam kelompok miskin dan tertindas secara struktural. *Subaltern* pendayung perahu ialah kelompok yang bekerja menggunakan perahu sebagai mata percaharian. Kelompok ini tergolong kategori pekerja *personal service*, para pendayung perahu melayani penumpang secara pribadi. Bagi kelompok yang berprofesi sebagai pendayung perahu, sudah menjadi suatu tradisi masyarakat di Desa Poka. Secara kultural, kemampuan yang dimiliki para pendayung perahu telah menjadi budaya sebagai masyarakat yang menjalani kehidupan di laut. Apalagi masyarakat di Rumah Tiga yang berprofesi sebagai pendayung perahu notabene berasal dari ragam wilayah di Maluku (Saparua, Nusalaut, Haruku, dan lain-lain). Beberapa wilayah yang disebutkan secara geografis, wilayah yang kehidupan sosial budaya di pesisir pantai.

Peneliti melihat bahwa adanya *habitus* tradisi menggunakan perahu yang dilakukan secara turun-temurun. Dundes (2017) dalam konsepnya folklor yang membahas tentang simbol primordial yang terus-menerus ditradisikan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data penelitian, para *subaltern* pendayung perahu sebelum adanya Jembatan Merah Putih banyak melayani penumpang yang menggunakan perahu karena biayanya terbilang cukup murah; untuk

2 orang penumpang membayar Rp 3.000, sedangkan untuk untuk malam hari 2 orang penumpang yang ingin menyeberangan harus membayar Rp10.000. Jadi, pendapatan mereka tidak menentu, berkisar Rp150.000-200.000 per hari. Hal ini berbeda dengan sekarang, pendapatan per hari mereka tidak menentu, berkisar Rp 50.000-75.000 dan harus menyettor kepada pemilik perahu yang di sewakan sebesar Rp 10.000 per hari.



Gambar 2. Pendayung Perahu (*Subaltern*) di Poka
(Sumber: Dokumen pribadi)

Peneliti melihat kelompok *subaltern* pendayung perahu sebelum adanya pembangunan Jembatan Merah Putih, masih tergolong kelompok miskin secara hierarki struktural, sebab belum memiliki kesadaran akan kehidupan yang baik (*good social*) dalam stratifikasi sosial masyarakat, dapat dilihat bahwa kelompok pendayung perahu hanya mampu memenuhi kebutuhan primer (makan, minum dan lain-lain). Sorokin (1998) mengatakan bahwa masyarakat terbagi dalam stratifikasi sosial, perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dasar dan inti sistem stratifikasi masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial.

Peneliti melihat fenomena yang dialami kelompok *subaltern* pendayung perahu ketika Pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP) diresmikan pada tahun 2016, kelompok *subaltern* pendayung perahu mengalami dampak negatif dari jembatan ini. Jembatan ini menelan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp 779,2 miliar. Namun, keberhasilan pemerintah dalam pembangunan jembatan ini menunjukkan disfungsi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan masyarakat. Menurut Chambers (2006), kemiskinan adalah suatu konsep integrasi yang memiliki lima dimensi: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), dan (5) keterasingan (*isolation*), baik secara geografis maupun sosiologis. Chamber membagi kemiskinan ke dalam empat bentuk: (1) kemiskinan absolut, bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembanguan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya; (3) kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap perseorangan atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha memperbaiki

tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Hamudy, 2013). Adapun menurut Kurniawan (2017), kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Pada konferensi PBB terkait pengembangan sosial, Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi yang ditandai kehilangan kebutuhan dasar manusia termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan informasi

Lebih lanjut, hal ini dapat dilihat sejak Jembatan Merah Putih ini diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan utama ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau *cable stayed*, dengan jarak antarpilon sepanjang 150 meter. Jembatan ini membentang di Teluk Dalam Pulau Ambon, yang menghubungkan Desa Rumah Tiga (Poka) di Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan Desa Hative Kecil/Poka di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur, menjadi bagian dari keseluruhan tata ruang Kota Ambon, dan menjadi ikon kota Ambon. Jembatan seyogianya berdampak kepada kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, kelompok perahu dayung yang beroperasi di perairan Teluk Ambon, pendapatan perahu dayung mengalami penurunan sehingga terjadi ketidakstabilan dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Dalam ruang sosial pendayung perahu mendapat diskriminasi stratifikasi dalam masyarakat yang bersifat *top-down*, secara politik mereka sebagai kelompok kecil hanya terdiam dengan regulasi pemerintah sebab tidak memiliki akses dengan para *stakeholder*. Persoalan yang dialami kelompok *subaltern* disebut kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan. Hal ini karena pembangunan yang berasal dari program pemerintah berdampak kepada perekonomian masyarakat. Begitupun kelompok ini kerap luput dari perhatian pemerintah apalagi di masa pandemi Covid-19, sembari berusaha keluar dari masalah dampak Jembatan Merah Putih. Kelompok *subaltern* dihadapkan dengan pandemi Covid-19, pada masa ini sejak 2020 hingga 2021 adanya regulasi pembatasan kelompok dalam berinteraksi misalnya PKM, PSBB, PPKM, dan lain-lain. Kondisi yang memprihatinkan ini semestinya telah ada dalam sebuah perancangan pemerintah daerah.

Strategi Aktif *Subaltern* Pendayung Perahu Poka-Galala dalam Mengatasi Kemiskinan

Strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan cara mengoptimalkan segala potensi yang ada, misal dengan melakukan aktivitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja, dan melakukan apa pun demi menambah penghasilan. Salah satu cara untuk mengatasi ketidakberdayaan suatu kelompok dari segi ekonomi ialah strategi untuk beradaptasi. Proses adaptasi dirasakan oleh kelompok *subaltern* perahu di Poka-Poka pascaperesmian tahun 2016. Pembangunan infrastruktur jembatan merah putih yang dinilai efektif untuk mempersingkat jarak tempuh ke Desa Poka. Namun, pembangunan ini berdampak pada kelompok pendayung perahu di Desa Poka, kelompok ini berupaya menyambung kebutuhan ekonomi demi menafkahi keluarga. Proses adaptasi kelompok ini sangat bervariasi, ada yang menjadi pedagang di pasar dan pekerja bangunan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa para pendayung perahu yang masih beroperasi meskipun pendapatan sudah tidak seperti dulu.

Penurunan pendapatan dari pekerjaan kelompok *subaltern* para pendayung perahu diakibatkan perubahan pembangunan sosial masyarakat.

Bagi peneliti, kelompok *subaltern* para pendayung perahu merupakan kelompok yang masih di bawah garis kemiskinan, sebab kelompok ini tergolong dalam kelompok yang tertindas atas kebijakan struktural pembangunan pemerintah Kota Ambon. Sejalan dengan apa yang dituturkan Conyers (1991) bahwa Indonesia merupakan negara dunia ketiga yang di dalamnya kebijakan pemerintah yang hanya berpusat kepada pembangunan infrastruktur. Baginya pemerintahan dunia ketiga tidak berfokus kepada dinamika sosial, politik, ekonomi dalam keseharian masyarakat. Dalam konteks Maluku dapat dilihat bahwa kebijakan pembangunan Jembatan Merah Putih menunjukkan bahwa pemerintah tidak mempedulikan sumber daya manusia, sehingga minimnya strategi terhadap pengembangan kemiskinan yang dialami kelompok akar rumput (*grass root*). Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat secara cepat membuat masyarakat kelas bawah terkena dampak yang cukup besar. Hal ini membutuhkan perhatian pemerintah kota terhadap keberlanjutan para pendayung perahu di Desa Poka.

Hampir sebagian besar masyarakat di Poka mengandalkan perahu dayung (*personal service*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peneliti melihat bahwa keahlian mereka dalam membawa perahu melintasi laut menjadi cara efektif bagi masyarakat untuk menciptakan pekerjaan bagi mereka. Secara teoretis, mereka tergolong dalam masyarakat marjinal (miskin) secara struktural. Kemiskinan struktural antara lain situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan. Beberapa keluarga mengatakan bahwa sejak adanya Jembatan Merah Putih, perahu dayung mulai berkurang jumlahnya. Awalnya mencapai ratusan perahu, sekarang hanya sekitar 20 lebih perahu yang beroperasi. Adapun yang mencari pekerjaan lain antara lain penangkap ikan dengan motor ikan, berjualan di pasar, dan lain-lain. Belum lagi kondisi berubah sejak tahun 2020 di kota Ambon ketika masyarakat merasa kesusahan akibat regulasi bekerja dari rumah pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelusuran, sebagian besar masyarakat beralih profesi menjadi tukang bangunan, bagi ibu-ibu ada yang berjualan di pasar. Upaya yang dilakukan kelompok *subaltern* semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang beralasan bahwa tindakan beralih profesi ini untuk menyekolahkan anak, ada yang di jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kelompok *subaltern* menyadari apabila mereka tidak bekerja, kebutuhan primer tidak dapat terpenuhi. Apalagi dalam pandangan para pendayung perahu, lebih baik mereka hidup susah, yang terpenting melihat keberhasilan anak di perguruan tinggi.

Berdasarkan temuan di atas peneliti melihat bahwa perlu adanya regulasi strategis terhadap masalah yang dialami masyarakat kelas bawah, antara lain *subaltern* pendayung perahu. Dilansir melalui situs media *online* sebuah pernyataan dari mantan Gubernur Maluku Said Assagaf yang mengatakan bila pembangunan Jembatan Merah Putih telah selesai, pemerintah akan memerhatikan kelompok *subaltern* pendayung perahu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa para pendayung perahu akan membantu mem-*branding* wisata laut di Kota Ambon, apalagi di Desa Poka sendiri, tepatnya lorong perahu, sempat viral hingga disiarkan *Kompas* Ambon, ada jembatan hias berwarna yang di buat untuk berfoto dengan latar belakang laut dan pesona bawah jembatan yang indah. Strategi ini dapat membantu kelompok *subaltern* pendayung perahu keluar dari ketidakberdayaan salah satunya kemiskinan.

Sutomo (2006) mengatakan bahwa penanganan masalah kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor tersebut, yaitu ekonomis, sosiologis, psikologis, dan politis. Aspek ekonomis antara lain menyangkut terbatasnya kepemilikan faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga, rentan terhadap kebutuhan mendesak karena tidak punya tabungan, kemampuan yang lemah dalam mengantisipasi peluang ekonomi. Aspek psikologis terutama berkaitan dengan perasaan rendah diri, sikap patalisme, dan merasa terisolasi. Aspek sosiologis terutama rendahnya akses pelayanan sosial, terbatasnya jaringan interaksi sosial, dan terbatasnya penguasaan informasi. Aspek politik antara lain berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, perilaku diskriminatif, lemahnya posisi dalam melakukan *bargaining* untuk menuntut hak, dan kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Secara teoretis, kelompok perahu dayung tergolong kelompok *subaltern* yang secara struktural jauh dari status sosial kelas atas dan menengah, mereka digolongkan kelas bawah sehingga mereka tidak memiliki akses dalam menjangkau ketidakberdayaan yang dialami.

Bagi peneliti, para pendayung perahu dalam konteks saat ini telah terlindas oleh zaman. Giddens mengatakan perubahan zaman salah satunya modernisasi. Modernisasi ibarat Juggernaut yang akan melindas kebudayaan yang menghalanginya. Para pendayung perahu seakan-akan telah terlindas oleh perubahan ketika pembangunan Jembatan Merah Putih. Kelompok *subaltern* akan tetap menjadi subordinat di kalangan masyarakat. Dengan begitu, peneliti melihat bahwa perlu adanya transformasi profesi, salah satunya menggunakan perahu dayung menjadi tempat wisata perahu dilihat sangat efektif, agar mereka tidak punah, selebihnya kelompok *subaltern* para pendayung perahu dapat menjadi aktor dalam mem-branding keindahan laut di wilayah pesisir Teluk Ambon.

Wilayah wisata perahu Kalimas di Surabaya yang sangat terkenal di kalangan warga Surabaya seyogianya dapat di-*cloning* oleh Dinas Pariwisata di Maluku. Dalam aturan berikut analisis SWOT dalam menganalisis langkah strategis sinergitas pemerintah dan *subaltern* perahu dayung terhadap kemajuan pengembangan wisata perahu di wilayah Teluk Ambon. Dengan demikian, perlu kerja kolektif antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat kelompok *subaltern* pendayung perahu, salah satunya di bidang wisata. Peneliti melihat bahwa perlu adanya sosialisasi, serta keterlibatan dinas pariwisata terkait strategi pengembangan destinasi wisata. Advokasi dalam bentuk sosialisasi di era pandemi Covid-19 menjadi pintu masuk pengembangan lapangan kerja bagi masyarakat di area Poka. Sejalan dengan pernyataan Inskip (dalam Alipour 1996), suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada beberapa aspek: (1) mempertahankan/menjaga kelestarian lingkungannya; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut; (3) menjamin kepuasan pengunjung; (4) meningkatkan keterpaduan dan unit pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zona pengembangannya. Sejalan dengan Inskip, peneliti melihat bahwa destinasi wisata perahu Desa Poka yang tergolong wisata perahu di teluk Ambon membutuhkan strategi dalam pengembangan keberlanjutan jangka panjang.

Analisis Swot Strategi Pengembangan Potensi Wisata Perahu Teluk Ambon bagi Neo-Subaltern Pendayung Perahu Poka-Poka

Dalam tindakan analisis strategi pengembangan potensi wisata perahu, peneliti melihat bahwa sejauh ini sejumlah penumpang yang menggunakan jasa para pendayung perahu untuk menikmati suasana laut di sekitar Teluk Ambon yang indah. Peneliti menggunakan analisis SWOT dari Rangkuti (2015) untuk melihat bahwa kelompok *subaltern* pendayung perahu membutuhkan sinergitas pemerintah dalam upaya membantu kelompok *subaltern* pendayung

perahu dalam mengubah status mereka menjadi kelompok yang berjuang dalam perubahan sosial pembangunan di Maluku. Kelompok perahu dayung seyogianya menjadi *neo-subaltern*. Disebut *neo-subaltern* sebab dengan mengembangkan wisata perahu kelompok tersebut dapat mengembangkan potensi alam menjadi sumber kekuatan. *Neo-subaltern* sendiri dikembangkan oleh Haqnawaz *et.al* (2020) yang mengatakan *neo-subaltern* adalah pembungkaman kelompok perempuan diaspora yang tertindas dalam ruang publik berdasarkan simbol agama (jilbab). Namun, berbeda dengan Haqnawas, *neo-subaltern* pendayung perahu seyogyanya dapat bertransformasi dengan memperjuangkan keberadaan status sosial sebagai rakyat Maluku, sebab mereka dapat berperan sentral dan berkontribusi menjadi agen wisata perahu Teluk Ambon.

1. Kekuatan

- a. Kelompok pendayung perahu sekitar 20-40-an. Kekuatan kelompok Subaltern secara sistematis semenjak peresmian Jembatan Merah Putih, sejauh ini masih tersisa 20-40 perahu yang digunakan untuk beroperasi sebagai *personal service* di kawasan bawah Jembatan Merah Putih.
- b. Kelompok perahu dayung memiliki kemampuan melaut di wilayah Teluk Ambon. Tradisi melaut telah menjadi kebiasaan (*habitus*) masyarakat Poka yang secara geografis hidup berdampingan dengan laut.
- c. Pemerintah Desa Poka memiliki dana desa yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berdasarkan administrasi, Desa Poka memiliki anggaran yang dialokasikan bagi negeri/desa agar membantu pemberdayaan masyarakat di Maluku.

2. Kelemahan

- a. Ketidakersediaan lapangan kerja di era pandemi Covid-19 yang berdampak bagi ekonomi masyarakat. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat kelompok *subaltern* sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan lain selain sebagai pendayung perahu. Apalagi sejak tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 yang mengharapakan mereka bekerja dari rumah.
- b. Melemahnya pemerintah desa dalam mempergunakan dana desa dan mengembangkan potensi wisata di Teluk Ambon. Seyogianya pemerintah Desa Poka memiliki anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, hanya saja tidak dipergunakan dengan baik. Misal, potensi wisata di Teluk Ambon untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

3. Peluang

- a. Festival Darwin yang melibatkan para pendayung perahu di Poka. *Event* yang dilakukan para pesiar dari Australia biasanya dilakukan di Teluk Ambon dan melibatkan para pendayung perahu.
- b. Lomba Perahu Belang yang melibatkan seluruh negeri di Maluku. Perahu Belang merupakan tradisi adat lokal orang Maluku, upaya ini untuk menghormati laut sebagai pusat kehidupan.
- c. Festival Manggurebe Arumbae yang diadakan di Teluk Ambon. Festival yang melibatkan para pendayung perahu di Maluku.
- d. Kantor Dinas Pariwisata untuk melihat potensi wisata di Kota Ambon. Dinas Pariwisata dilihat sebagai lembaga yang memiliki peran dalam mengeksplorasi potensi wisata di Maluku.
- e. Peraturan daerah Kota Ambon nomor 4 tahun 2011 mengatur wisata budaya. Peraturan daerah yang melegitimasi potensi wisata sehingga adanya pembangunan wisata berbasis budaya.

4. Ancaman

- a. Pembangunan Jembatan Merah Putih di wilayah Poka-Galala. Pembangunan jembatan sendiri sangat bermanfaat, tetapi memiliki efek negatif bagi masyarakat perahu dayung.
- b. Persaingan angkut laut *speed boat* area Pasar Mardika. Transportasi laut yang berada di Mardika ini memiliki dampak bagi para pendayung perahu.

- c. Tempat wisata baru di wilayah Negeri Halong. Salah satu wilayah di sebelah Poka yang sejauh ini dijadikan tempat wisata pantai.

Atas dasar analisis di atas, faktor internal (Strengths/Weaknesses) dan analisis eksternal (Opportunities/Threats), ada beberapa strategi yang dikemukakan sebagai berikut.

1. Perhatian terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Poka yang bersumber dari APBD. Hal ini bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi pembangunan masyarakat, misal anggaran dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan potensi wisata (SO).
2. Kesadaran kolektif masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata perahu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 4 tahun 2011 mengatur wisata budaya. Peraturan daerah yang melegitimasi potensi wisata sehingga adanya pembangunan wisata berbasis budaya (WO).
3. Kelompok perahu dayung memiliki kemampuan melaut di wilayah Teluk Ambon. Pemandangan di bawah Jembatan Merah Putih digunakan untuk menarik pengunjung (ST).
4. Pengembangan wisata perahu dapat membantu para pendayung perahu dalam menghadapi persaingan dengan *speed boat* dan wisata pantai di Negeri Halong (WT).

SIMPULAN

Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis kelompok *subaltern* pendayung perahu yang mengalami diskriminasi struktural oleh kelompok kelas elitis. Semenjak Jembatan Merah Putih (JMP) diresmikan, kelompok pendayung perahu mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, padahal mereka memiliki kebutuhan primer dan sekunder yang secara sosial harus terpenuhi sebagai warga negara Indonesia yang demokratis. Perahu yang bagi masyarakat Maluku ialah simbol budaya sangat tidak dihargai, sehingga perlu adanya strategi pengembangan wisata perahu yang berdampak pada pemberdayaan kelompok pendayung perahu. Selain memperbaiki perekonomian, hal ini juga membantu *mem-branding* teluk Ambon sebagai tempat wisata perahu di sekitar Jembatan merah putih (JMP).

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih dipersembahkan bagi Lembaga Pendidikan Universitas Pattimura yang telah membantu pembiayaan penelitian di Desa Poka, serta seluruh masyarakat dan pemerintah Desa Poka, khususnya para pendayung perahu Teluk Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. 2006. "What is Poverty? Concepts and Measures." *Poverty in Focus* (Desember).
- Chandra, Uday. 2015. "Rethinking Subaltern Resistance." *Journal of Contemporary Asia* 45 (4), 563-573.
- Conyers, D. 1991. "Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar." Dalam *Kecamatan Candisari dalam Angka 2018*.
- Cresswel, J. W. 2008. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Danish, Malik Haq Nawaz, Muhammad Ajmal Khan, Saira Akhtar, dan Samina Yasmeen. 2020. "Silencing of the Neo-Subaltern Voice: Historiography of the 'Oppressed.'" *Review on Applied Management and Social Sciences* 3 (3), 339-345. DOI: 10.47067/ramss.v3i2.68.

- D'Aveni, R. 1999. "Strategic Supremacy through Disruption and Dominance." *MIT Sloan Management Review*, 15 April (Spring)
- Dundes, A. 2017. "The Study of Folklore in Literature and Culture." Dalam *Folk Groups and Folklore Genres Reader*. DOI: 10.2307/j.ctt46nxcv.37.
- Hamudy, M. 2013. "PNPM Mandiri vs Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja*. DOI: 10.21787/jbp.05.2013.159-162.
- Kubangun, Nur Aida. 2020. "Subaltern and Network Strategy toward Fisherman Community in Aru Island District." 3rd International Conference on Social Science 184.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, M. 2017. "Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8 (1), 16-20.
- Maji, Sankha. 2015. "The Neo-Subaltern: Contemporary Dissident Movements of Adivasis in the Junglemahal." *Subalternspeak: An International Journal Of Postcolonial Studies* 3 (4), 1-7.
- Morton, S. 2010. "Gayatri Chakravorty Spivak (1942-)." Dalam *From Agamben to Zizek: Contemporary Critical Theorists*. DOI: 10.4324/9781315558806-41.
- Sorokin, Pitirin A. 1998. *Social Stratification*. Harper.
- Rangkuti, F. 2015. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Reed, J. P. 2013. "Theorist of Subaltern Subjectivity: Antonio Gramsci, Popular Beliefs, Political Passion, and Reciprocal Learning." Dalam *Critical Sociology*. DOI: 10.1177/0896920512437391.
- Ruslin, I. T. 2017. "Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar." *Jurnal Politik Profetik* 5 (2), 185-199.
- Siagian, Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, Yulius. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UNS Press.
- Spivak, G. C. 2020. "Subaltern Studies: Deconstructing Historiography." Dalam *In Other Worlds*. DOI: 10.4324/9780203441114-21
- Sutomo, Rudi. 2006. "Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Kota Palembang." Palembang: Universitas Sriwijaya.